

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika., Jakarta, 2012, hal 4.
- Indah Sari, 2018, “Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 9, No. 1, hal.41.
- Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Cetakan Pertama, Oktober, hal 7.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. 2019. *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, No.3, hlm. 352-365.
- Muhammad Kamal. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Cetakan Pertama, Oktober 2019, hal 4.
- Aditya Weriansyah, et al, *Tinjauan Hukum Implementasi Undang Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Di Indonesia*, International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Jakarta, 2023.
- Phattaranit Yaodam, Kanyarat Wiphatawat, Apiradee Thienthong, *Compensation for Victims of Trafficking in Persons, Human Rights and Development Foundation*, Bangkok, 2019
- Syaiful Bakhri, *Sistim Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 69.
- P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, hlm. 47.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm. 35.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 38.
- C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 290-291.
- Ali Imron, SH., MH. Muhamad Iqbal, SH., MH. *Hukum Pembuktian*, UNPAM PRESS, Cetakan pertama, 25 Maret 2019, hal 21.

## **B. JURNAL**

- Andi Bau Mallarangeng et al, 2023, *Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Journal of Law, Vol. 2 No. 2.
- Andre Edwin Johannes et al, 2023, *Human Trafficking: A Systematic Review And Future Research Agenda*, Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, Vol. 27, No. 2.
- Any Suryani Hamzah, *Lalu Muhammad Hayanul Haq, Ufran, 2021, Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 2 , No. 1
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.
- Bogi Yulianawati, Hartanto, Teguh Satya Bhakti, 2025, *Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr*, Binamulia Hukum, Vol. 14, No. 1.
- IOM Indonesia. *Counter-Trafficking Annual Report, International Organization for Migration*, Jakarta, 2023.
- Koalisi Perempuan Indonesia, *Makalah Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta
- Nugroho, R. (2019). *Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi Dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Verstek, 7(1).
- Subekti, R. (2010). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramita.
- WIDIASTUTI, T. W. (2010). *UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)*. Wacana Hukum, IX(1).
- Prafitriana, K. (2016). *Penggunaan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Verstek, 4(3).

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296, Pasal 297, Pasal 324
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

#### **D. WEBSITE**

Mahkamah Agung, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MK dan Keadilan Prosedural: Menjaga Keseimbangan Hak Individu dan Kepentingan Umum.

<https://testing.mkri.id/berita/mk-dan-keadilan-prosedural:-menjagakeseimbangan-hak-individu-dan-kepentingan-umum-21789> diakses 2025.

Kemenko PMK, Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

<https://www.kemenkopmk.go.id/penguatan-data-dan-inovasi-dalampenanganan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpo> diakses 2025.

<https://www.ohchr.org/en/universal-declaration-of-human-rights> diakses 2025.

U.S Department of State, 2024 *Trafficking in Persons Report: Indonesia*.

<https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/indonesia/> diakses 2025

<https://bengkulu.antaranews.com/berita/297777/polisi-ungkap-19-kasus-tpo-di-wilayah-provinsi-bengkulu>. diakses 2025.

#### **E. SUREL DAN LAINNYA**

Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI.

LP/B/86/XII/2024/SPKT.

Yoga Okta Prima, S.H, *tahapan pembuktian*, 19 Desember 2025

Yoga Okta Prima, S.H, *pembuktian unsur subjek dan anak korban*, 19 Desember 2025.

BRIPTU Dandi Hermansyah, S.H, *penentuan status korban dalam proses penyelidikan*, 19 Desember 2025.

BRIPTU Dandi Hermansyah, S.H, *Larangan Memperdagangkan anak dan Undang-Undang Perlindungan anak*, Hasil wawancara, 19 Desember 2025.

LAMPIRAN





